

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Literatur

- a. Bambang Sunggono, *"Metodologi Penelitian Hukum"*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta
- b. Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *"Metodologi Penelitian"*, Bumi Aksara, Jakarta, 2011
- c. Chabib Soleh dan Heru Rochmansyah, *"Pengelolaan Keuangan Desa "*, Fokus Media, Bandung, 2015, hlm 1
- d. J. Supranto, *"Metode Penelitian Hukum dan Statistik"*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003
- e. Nanang Nugraha, *"Model Kewenangan Wakil Kepala Daerah dalam Pemerintahan Daerah "*, Refika Aditama, Bandung, 2013
- f. *Pedoman Teknis Pengembangan Jalan Pertanian TA.2013*, Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan dan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian, Jakarta, 2015
- g. Rianto Adi, *"Aspek Hukum dalam Penelitian"*, Jakarta, 2015
- h. Soerjono Soekanto, *"Pengantar Penelitian Hukum"*, Jakarta, UI Press, 2005
- i. Sugiyono, *"Metode Penelitian Kualitatif (Untuk penelitian yang bersifat eksploratif, enterpretif, interaktif, dan kontruktif)"*, Alfabeta, Bandung, 2017
- j. Yosef Mario Monteiro, *"Pemahaman Dasar Hukum Pemerintah Daerah"*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2016

Jurnal

- a. Abdussakur, *“Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Wilayah Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan”*, Volume 1, Nomor 1
- b. Budi Setiawati, Ahmad Farhani, *“Analisis Kinerja Pemerintah Desa untuk Pembangunan Infrastruktur Jalan Usaha Tani di Desa Matarah Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur”* Volume 3, Nomor 2
- c. Dauri, Thio Haikal Anugerah, Hanifah Nuraini, *“Problematika Hukum dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Perspektif Otonomi Daerah di Lampung”*, Jurnal Hukum, Universitas Lampung, Volume 13, Nomor 1, 2020
- d. Henny Juliani, *“Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja dalam Pengelolaan Keuangan Negara untuk Mewujudkan Good Government”*, Jurnal Masalah Hukum, Volume 39, Nomor 4, 2010
- e. Penta Widyartati, Ariyani Indriastuti, *“Analisis Kesesuaian APBDes dengan Perencanaan Pembangunan Desa Berdasarkan PP Nomor 43 Tahun 2014 di Desa Kaligadung Kecamatan Boja Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah”*, Jurnal STIE Semarang, Volume 11, Nomor 1, 2019
- f. Yeripo Sarepa, *“Kebijakan Pemerintah Desa dalam Penggunaan Dana Desa Corporate Social Responsibility Desa Boboliat Gayok Kecamatan Maliful Kabupaten Halmahera Utara”*, Jurnal Ilmu Pemerintah, 2017

Peraturan Perundang-Undangan

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalah;
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Informasi Pemerintah;
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- i. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 52/Permentan/RC.240/12/2018 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pertanian;
- j. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2019;
- k. Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2016 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kudus;

- l. Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 8 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kudus;
- m. Peraturan Bupati Kudus Nomor 62 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021
- n. Peraturan Bupati Kudus Nomor 36 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
- o. Peraturan Desa Golantepus Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Golantepus Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus tahun 2020;
- p. Peraturan Desa Golantepus Nomor 02 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Golantepus Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus tahun 2021.